

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran Pada Kualitas Laporan Keuangan

Ni Made Sarasita Novi Paramartha¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia.
Email: sarasita.novi@gmail.com

Ketut Alit Suardana²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Indonesia.

ABSTRAK

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang ada di UPT. Disdikpora Kabupaten Badung. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala UPT, kasubag keuangan dan 3 staf bagian keuangan UPT Disdikpora yang ada di Kabupaten Badung berjumlah 6 UPT yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga jumlah sampel yang ditetapkan adalah 30 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan dan efektivitas pelaksanaan pengawasan anggaran berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan; Pengawasan Anggaran; Kualitas Laporan.

Effect of Application of Financial Accounting Systems and Effectiveness of Budget Supervision Implementation on the Quality of Financial Statements

ABSTRACT

The population in this study were all PNS Regional Financial Management Work Units (SKPKD) in the UPT. Disdikpora of Badung Regency. The sample collection technique used was *purposive sampling* method. Respondents in this study were the Head of the UPT, the subdivision of finance and 3 staff of the finance department of the UPT Disdikpora in Badung Regency totaling 6 UPT spread across all sub-districts, so the number of samples set was 30 people. Methods of collecting data using questionnaires. The data analysis technique used is *multiple linear regression analysis*. The results of the analysis show that the local government financial accounting system has a positive effect on the quality of financial statements and the effectiveness of the implementation of budget monitoring has a positive effect on the quality of financial statements.

Keywords : Financial Accounting System; Budget Supervision; Report Quality.



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 29 No. 1
Denpasar, Oktober
2019
Hal. 96-110

Artikel masuk:
23 Juni 2019

Tanggal diterima:
28 Agustus 2019

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah merupakan hal penting yang menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah terus berusaha menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia hingga sampai pada sistem pengelolaan yang saat ini digunakan pemerintah. Adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memerlukan kejelasan akan wewenang mengenai pengelolaan keuangan. Sistem pengelolaan keuangan yang terpisah antara pusat dan daerah menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada perubahan-perubahan yang terjadi baik di pusat maupun di daerah (Fitriani., 2017). Meskipun terdapat perubahan-perubahan dan penyesuaian, pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan tertib, mengikuti peraturan yang berlaku, melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien serta ekonomis dan tetap menjaga transparansi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (Hariyanto, 2012). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga agar pemerintah pusat maupun daerah melakukan kewajibannya mengenai pengelolaan keuangan adalah dengan mengeluarkan aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan yang salah satu kewajiban dari pemerintah daerah adalah melakukan pertanggungjawaban mengenai keuangan daerah yang dituangkan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD.

Penelitian Pangalila & Warongan (2016) menyatakan bahwa SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Akuntansi pemerintah daerah dipisahkan menjadi 2 yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Dua perspektif umum yang banyak digunakan dalam penilaian kualitas pelaporan keuangan (Jonas & Blanchet, 2000). Perspektif pertama bergantung pada kebutuhan pengguna. Di bawah perspektif ini, kualitas pelaporan keuangan ditentukan berdasarkan kegunaan informasi keuangan untuk penggunaannya (Baxter., 2007). Perspektif kedua kualitas pelaporan keuangan difokuskan pada gagasan perlindungan pemegang saham/investor. Perspektif kebutuhan pengguna terutama berkaitan dengan penyediaan informasi yang relevan pengguna untuk membuat keputusan, sedangkan perspektif perlindungan pemegang saham/ investor bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pengguna cukup untuk kebutuhan mereka, transparan dan kompeten. Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Wibawa *et al.*, 2017). Teori legalitas memiliki hubungan erat dengan laporan keuangan. Legalitas juga menyangkut bagaimanakah sebuah perusahaan atau instansi mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi, teori ini mengharuskan semua instansi menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jika seluruh aparat yang ditugaskan untuk melaksanakan

pengawasan anggaran dengan benar maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Adanya berbagai perubahan dalam pengelolaan dasar, kinerja keuangan daerah tersebut di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengingat fenomena transparansi dan tuntutan akuntabilitas yang marak ditemukan pada Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya pada pengelolaan keuangan di SKPD untuk mendapatkan bukti-bukti empiris tentang transparansi penyaluran dana Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung oleh UPT kecamatan ke sekolah-sekolah baik SD maupun SMP, namun belum ditemukan laporan pertanggungjawaban tentang penyaluran dana tersebut secara detail. Pelaporan keuangan dalam pemeriksaannya secara umum dan secara spesifik hanya dilakukan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, sehingga UPTD yang menjadi bagian dari Disdikpora relatif jarang untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Informasi tersebut dapat diakses melalui layanan E-Lapor pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Badung, yang secara umum ditujukan pada penyelenggaraan pendidikan. SKPD Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Badung adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga yang memiliki 6 Cabang UPT di Setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung.

Rakyat wajib mendapatkan perlindungan hukum merupakan prinsip penting yang dianut oleh asas legalitas. Christianto & Hwian (2009) mengungkapkan "*Prinsip Legality*" merupakan karakteristik yang *essentieel*. Profesor Simons mengatakan bahwa undang-undang Pidana itu adalah keseluruhan peraturan-peraturan menurut undang-undang yang menentukan dan mengatur pertanggung jawaban menurut hukum pidana (Christianto & Hwian., 2009). Undang-undang Pidana dalam arti yang luas semacam itu, seperti yang antara lain telah dipergunakan dalam Bab pertama Buku ke-I dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi kitab undangundang itu sendiri berikut semua undang-undang, keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan pidana.

Melakukan operasi pada prinsip-prinsip akuntansi sesuai SAP dan aturan akuntansi yang berlaku, diperlukan suatu instrumen yang pada pemerintah daerah instrumen tersebut disebut dengan sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD. SAPD berisikan rangkaian proses akuntansi. SAPD menjelaskan secara rinci wewenang-wewenang, kewajiban, serta transaksi-transaksi yang dilakukan.

Pengawasan merupakan hal yang penting dilakukan terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengawasan meliputi melakukan evaluasi pada kinerja dan keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa APBD dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Putra, 2017). Pengawasan pada pemerintah daerah dilakukan dengan dasar bahwa terdapat peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh pemerintah daerah dan pengawasan yang dilakukan adalah untuk memastikan pemerintah daerah telah melakukan mandat yang diberikan dan telah melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan,

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan, sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diduga bahwa kualitas laporan dipengaruhi oleh sistem akuntansi pemerintah daerah dan faktor pengendalian anggaran, salah satunya adalah pengawasan.

Dalam penelitian ini kualitas laporan yang dimaksud adalah prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami. Berdasarkan teori legalitas menyatakan jika seluruh aparat penyelenggara sistem akuntansi keuangan daerah mematuhi seluruh aturan-aturan yang ada maka semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan.

Sistem akuntansi keuangan regional adalah sistem yang mendokumentasikan, mengelola, dan memproses data manajemen keuangan regional dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka merencanakan, mengimplementasikan, dan melaporkan kembali pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik dan dapat dijadikan referensi ketika akan mengambil suatu keputusan. Sistem informasi yang buruk dan tidak memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan tidak akan berguna dan pengguna akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan (Bangsa, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Sugut (2014) menyatakan bahwa SAK terkomputerisasi akan menjadi hasil dari laporan keuangan yang berkualitas. Murungi & Kayigamba (2015) menemukan hasil bahwa Sistem akuntansi terkomputerisasi telah terbukti efektif dalam memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas secara tepat waktu dan efisien.

Hasil penelitian Kanakriyah (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan sistem informasi akuntansi pada kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan. Afiah & Azwari (2015) dan Muskanan (2014) menunjukkan hasil bahwa kualitas laporan keuangan pemerintahan yang baik dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh sistem akuntansi keuangan yang berkualitas. Wati & Sinarwati (2014) dalam penelitian yang dilakukannya mendapatkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif pada kualitas laporan keuangan.

H₁: Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan di UPT Disdikpora Kabupaten Badung.

Berdasarkan teori legalitas menyatakan jika seluruh aparat yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Pengawasan merupakan hal yang penting dilakukan terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengawasan meliputi melakukan evaluasi pada kinerja dan keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa APBD dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Putra, 2017). Pengawasan

pada pemerintah daerah dilakukan dengan dasar bahwa terdapat peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh pemerintah daerah dan pengawasan yang dilakukan adalah untuk memastikan pemerintah daerah telah melakukan mandat yang diberikan dan telah melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dobija (2015) menyebutkan bahwa untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan anggaran diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang memadai di bidang akuntansi, audit keuangan dan manajemen keuangan. Menurut Kanters (2017) Pengawasan yang efektif membutuhkan persiapan yang baik. Karena itu sangat penting bagi kedua anggota portofolio komite dan staf komite mempersiapkan dengan baik untuk melakukan pengawasan tahunan laporan.

Proses mencapai laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, salah satunya adalah melakukan pengawasan anggaran secara rutin dengan cara memberikan informasi kinerja keuangan, memberi manfaat alokasi keuangan dalam laporan anggaran dan tidak menghambat akuntabilitas pengawasan (Downe & Nicol., 2016). Penelitian Santiso (2014) menemukan bahwa efektifitas legislatif pengawasan anggaran dapat menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah dan memperkuat akuntabilitas keuangan publik. Khaile (2011) dan Schalk (2014) menyatakan bahwa efektivitas pengawasan anggaran mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nurillah (2014), Sugandi (2013) dan Yosefrinaldi (2013) dalam penelitian yang dilakukannya menemukan hasil yaitu terdapat hubungan yang positif antara sistem pengendalian internal pada kualitas laporan keuangan.

H₂: Efektivitas pelaksanaan pengawasan anggaran berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan di UPT. Disdikpora Kabupaten Badung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di UPT Disdikpora Kabupaten Badung yang tersebar di seluruh Kecamatan meliputi UPTD Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan.

Obyek penelitian ini bersifat alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi peneliti (Sugiyono, 2017). Obyek dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yang ada di UPT. Disdikpora Kabupaten Badung, bagaimana kaitannya dengan sistem akuntansi pemerintah daerah dan efektivitas pengawasan.

SAPD adalah sistem pencatatan anggaran SKPD di Daerah Kabupaten Badung yang diatur oleh Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Indikator pengukuran variabel SAPD adalah standar pencatatan keuangan SKPD, standar pengguna anggaran keuangan SKPD, standar pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD), langkah-langkah teknis.

Pengawasan merupakan hal yang penting dilakukan terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengawasan meliputi melakukan evaluasi pada kinerja dan keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa APBD dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Putra, 2017). Pengawasan pada pemerintah daerah dilakukan dengan dasar bahwa terdapat peraturan-

peraturan yang wajib ditaati oleh pemerintah daerah dan pengawasan yang dilakukan adalah untuk memastikan pemerintah daerah telah melakukan mandat yang diberikan dan telah melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran adalah proses kegiatan di Kabupaten Badung yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui apakah perencanaan yang telah disusun sudah berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis atau belum.

Indikator pengukuran variabel efektivitas pelaksanaan pengawasan anggaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Perencanaan program pengawasan, Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Indikator pengukuran variabel kualitas laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat Dipahami

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang ada di UPT. Disdikpora Kabupaten Badung yang berjumlah 89 orang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan maksud atau tujuan tertentu karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala kantor, kasubag keuangan dan 3 staf bagian keuangan UPT Disdikpora yang ada di Kabupaten Badung berjumlah 6 UPT yang tersebar di seluruh kecamatan, sehingga jumlah sampel yang ditetapkan adalah 30 orang.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data tentang Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran dan Kualitas Laporan Keuangan. Ditinjau dari sifat obyek dan sumber data, informasi yang diteliti bersifat abstrak sehingga metode pengumpulan data yang dipilih adalah metode kuisisioner. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017 : 142).

Kuisisioner dalam penelitian ini menggunakan pola skala Likert. Rentangan skor yang dipakai adalah sebagai berikut SS = 5 (Sangat Setuju), S = 4 (Setuju), N = 3 (Netral), TS = 2 (Tidak Setuju), STS = 1 (Sangat Tidak Setuju).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). Data kuantitatif yang digunakan adalah data yang diperoleh berupa angka/berdasarkan hasil pengukuran pada variabel penelitian.

Dilihat dari sumbernya, sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis atau peneliti, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya

serta hasilnya akan digunakan langsung oleh penulis atau peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dicari jawabannya. Data primer dalam penelitian ini adalah melakukan penyebaran kuisisioner pada responden di 6 UPT Disdikpora Kabupaten Badung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 30 orang pegawai UPT. Disdikpora Kabupaten Badung.

Tabel 1. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	30
Kuesioner yang tidak kembali	-
Kuesioner yang dikembalikan	30
Kuesioner yang digunakan	30
Tingkat Pengembalian (<i>Respons rate</i>) $\frac{\text{Kuesioner yang dikembalikan}}{\text{Kuesioner yang dikirim}} \times 100\%$	100%
Tingkat Pengembalian yang digunakan (<i>useable response rate</i>) $\frac{\text{Kuesioner yang diolah}}{\text{Kuesioner yang dikirim}} \times 100\%$	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 30 buah eksemplar dengan tingkat pengembalian 100% sehingga total kuesioner yang digunakan sebanyak 30 buah.

Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebar kepada responden penelitian sejumlah 30 orang pegawai UPT. Disdikpora Kabupaten Badung. Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan responden, dan lama bekerja. Ringkasan mengenai karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	18	60,00
	Wanita	12	40,00
	Total	30	100
Usia	19-25 Tahun	6	20,00
	26-35 Tahun	12	40,00
	36-45 Tahun	4	13,33
	> 46 Tahun	8	26,67
	Total	30	100
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	8	26,67
	D3	6	20,00
	S1	13	43,33
	S2	3	10,00
	Total	30	100
Lama Bekerja	1-5 tahun	10	33,33
	5-10 tahun	14	46,67
	> 10 tahun	6	20,00
	Total	30	100

Sumber : Data Penelitian, 2019

Profil jenis kelamin digunakan untuk mengetahui proporsi pegawai pria dan wanita. Pegawai pria sebanyak 18 orang (60%) dan pegawai wanita sebanyak 12 orang (40%). Informasi ini memberikan gambaran bahwa mayoritas pegawai UPT. Disdikpora Kabupaten Badung adalah pria.

Profil terkait usia menunjukkan kelompok umur pegawai UPT. Disdikpora Kabupaten Badung. Pegawai dengan rentang usia 19 sampai 25 tahun sebanyak 6 orang (20%), pegawai dengan rentang usia 26 sampai 35 sebanyak 12 orang (40%), pegawai dengan rentang usia 36 sampai 45 tahun sebanyak 4 orang (13,33%), dan sisanya sebanyak 8 orang (26,67%) adalah pegawai dengan rentang usia lebih dari 46 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini mayoritas pegawai berusia antara 26 sampai 35 tahun di UPT. Disdikpora Kabupaten Badung.

Tingkat pendidikan S1 mendominasi jumlah tingkat pendidikan responden yaitu sebanyak 13 orang pegawai (43,33%), kemudian sebanyak 8 orang pegawai (26,67%) memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK Sederajat, sebanyak 6 orang pegawai (20%) memiliki tingkat pendidikan D3, dan sisanya 3 orang pegawai (10%) memiliki tingkat pendidikan S2.

Responden yang memiliki masa kerja 1 sampai 5 tahun sebanyak 10 orang pegawai (33,33%), selanjutnya responden yang bekerja selama 5 sampai 10 tahun sebanyak 14 orang pegawai (46,67%), dan sisanya responden yang bekerja selama lebih dari 10 tahun sebanyak 6 orang pegawai (20%).

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Sig. (2-tailed)	Keterangan	
Sistem	X _{1,1}	0,510	0,004	Valid	
Akuntansi	X _{1,2}	0,798	0,000	Valid	
Keuangan	X _{1,3}	0,368	0,045	Valid	
Pemerintah	X _{1,4}	0,650	0,000	Valid	
Daerah (X1)	X _{1,5}	0,723	0,000	Valid	
	X _{1,6}	0,837	0,000	Valid	
	X _{1,7}	0,629	0,000	Valid	
	X _{1,8}	0,704	0,000	Valid	
	Efektivitas	X _{2,1}	0,400	0,028	Valid
	Pelaksanaan	X _{2,2}	0,642	0,000	Valid
	Pengawasan	X _{2,3}	0,680	0,000	Valid
	Anggaran (X2)	X _{2,4}	0,751	0,000	Valid
X _{2,5}		0,827	0,000	Valid	
X _{2,6}		0,506	0,004	Valid	
X _{2,7}		0,725	0,000	Valid	
X _{2,8}		0,447	0,013	Valid	
Kualitas		Y ₁	0,596	0,001	Valid
Laporan		Y ₂	0,438	0,015	Valid
Keuangan (Y)		Y ₃	0,389	0,034	Valid
	Y ₄	0,526	0,003	Valid	
	Y ₅	0,449	0,013	Valid	
	Y ₆	0,706	0,000	Valid	
	Y ₇	0,549	0,002	Valid	
	Y ₈	0,654	0,000	Valid	
	Y ₉	0,784	0,000	Valid	

Sumber : Data Penelitian, 2019

Instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid. Untuk mengetahui apakah suatu instrumen telah valid atau tidak maka dilakukan uji validitas. Syarat yang harus dicapai suatu instrument agar tergolong instrument yang valid adalah skor total seluruh pertanyaannya harus lebih rendah dari 0,05. Dari syarat tersebut disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini termasuk pada kategori valid. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji validitas pada tabel yang menunjukkan bahwa skor total pertanyaan pada instrument penelitian yang digunakan memiliki nilai signifikansi yang lebih rendah dari 0,05.

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner indikator dari variabel atau konstruk. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali & Chairi., 2016). Dalam pengujian ini peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel dengan melihat *cronbach alpha* dengan signifikan yang digunakan lebih besar dari 0,07. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* >0,07 (Ghozali & Chairi., 2016).

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X_1)	0,762	Reliabel
2	Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran (X_2)	0,751	Reliabel
3	Kualitas laporan keuangan (Y)	0,738	Reliabel

Sumber : Data Penelitian,2019

Dilakukan uji reliabilitas dengan syarat *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan harus memiliki nilai lebih dari 0,06 agar tergolong reliabel atau dapat diandalkan untuk penelitian. Pada tabel disajikan bahwa semua variabel yang digunakan pada penelitian adalah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan mampu melebihi 0,06.

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali & Chairi., 2016). Seperti diketahui uji F dan uji T mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *kolmogorov smirnov* (K-S), data dinyatakan normal apabila koefisien *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari nilai signifikan 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.01683837
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.056
Kolmogorov-Smirnov Z		.441
Asymp. Sig. (2-tailed)		.990

Sumber : Data Penelitian,2019

Nilai signifikansi yang didapatkan setelah dilakukan uji normalitas adalah 0,990. Nilai ini berhasil melebihi 0,05. Syarat yang ditentukan yaitu nilai signifikansi yang dihasilkan harus melebihi 0,05 agar model persamaan regresi penelitian tergolong berdistribusi normal.

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali & Chairi., 2016). Multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan tidak terjadi multikoleniaritas.

Tabel 6. Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X_1)	0,482	2,077	Bebas multikolinieritas
Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran (X_2)	0,482	2,077	Bebas multikolinieritas

Sumber : Data Penelitian, 2019

Agar terhindar dari masalah multikolinearitas syarat yang harus dipenuhi adalah nilai *tolerance* haruslah melebihi 10 persen dan nilai VIF yang harus kurang dari 10. Setelah dilakukan uji multikolinearitas, dapat dilihat pada tabel 6 masing-masing variabel bebas telah memenuhi syarat sehingga model regresi yang digunakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain (*nilai errornya*) (Ghozali & Chairi., 2016). Pengujian ini dilakukan dengan uji *glejser* yakni dengan cara meregresi nilai absolute residual dari model yang diestimasi terhadap variabel independen. Jika tidak ada satu pun variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolute residual atau nilai signifikansinya diatas 5 persen maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X_1)	0,292	Bebas Heteroskedastisitas
Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran (X_2)	0,107	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data Penelitian, 2019

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai Signifikansi dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,292, dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran sebesar 0,107. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap *absolute residual*. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,154	3,426		2,672	0,013
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran	0,300	0,138	0,329	2,185	0,038
	0,558	0,147	0,571	3,787	0,001
<i>R Square</i>	0,683				
F hitung	32,217				
Signifikansi F	0,000				

Sumber : Data Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 8, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 9,154 + 0,300 X_1 + 0,558 X_2 + e$$

Koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan kemampuan variasi variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh nilai determinasi total (*adjusted R Square*) sebesar 0,683 mempunyai arti bahwa sebesar 68,3% variasi Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variasi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran, sedangkan sisanya sebesar 31,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Hasil uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 32,217 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, berarti bahwa pada kelompok yang diuji memiliki perbedaan yang nyata (signifikan). Hasil ini mempunyai arti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara faktor sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, dan efektivitas pelaksanaan pengawasan anggaran secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas bernilai positif dengan nilai signifikansi uji t kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil dari uji t atau pengujian hipotesis dijabarkan sebagai berikut.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada Kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada Kualitas laporan keuangan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,038 dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,300. Nilai signifikansi $0,038 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Kualitas laporan keuangan pada UPT. Disdikpora Kabupaten Badung.

Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran pada Kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran pada kualitas laporan keuangan diperoleh nilai

signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,558. Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan pada UPT. Disdikpora Kabupaten Badung.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada UPT. Disdikpora Kabupaten Badung maka akan berpengaruh pada semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan UPT. Disdikpora Kabupaten Badung tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah maka akan berpengaruh pada semakin berkurangnya kualitas laporan keuangan UPT. Disdikpora Kabupaten Badung tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori legalitas yang menyatakan jika seluruh aparat penyelenggara sistem akuntansi keuangan daerah mematuhi seluruh aturan-aturan yang ada maka semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan. Hal ini memberikan informasi bahwa diterapkannya Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah membuat manajemen akan lebih menekankan pentingnya pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati & Sinarwati (2014) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang berarti bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Roviyantje (2011) serta Ratifah & Ridwan (2012) menemukan hasil yaitu adanya pengaruh yang positif antara hubungan SAK daerah pada kualitas laporan keuangan. SAK daerah yang diterapkan dan dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan. Dampak dari penerapan SAK yang baik yaitu laporan keuangan yang dihasilkan juga akan berkualitas baik begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada UPT. Disdikpora Kabupaten Badung bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah memiliki peran dan tujuan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada Kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin efektif Pelaksanaan Pengawasan Anggaran yang dilaksanakan oleh UPT. Disdikpora Kabupaten Badung, maka akan berpengaruh pada meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin tidak efektif Pelaksanaan Pengawasan Anggaran yang dilaksanakan UPT. Disdikpora Kabupaten Badung maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berkurang.

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran sangat diperlukan dalam mengembangkan kualitas laporan keuangan karena dengan adanya Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Anggaran pada organisasi, maka anggota organisasi

tersebut dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan secara lebih efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori legalitas yang menyatakan jika seluruh aparat yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Pengawasan merupakan hal yang penting dilakukan terhadap proses pengelolaan keuangan. Pengawasan meliputi melakukan evaluasi pada kinerja dan keputusan-keputusan yang diambil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa APBD dilaksanakan dengan efektif dan efisien (Putra, 2017). Pengawasan pada pemerintah daerah dilakukan dengan dasar bahwa terdapat peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh pemerintah daerah dan pengawasan yang dilakukan adalah untuk memastikan pemerintah daerah telah melakukan mandat yang diberikan dan telah melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini sesuai hasil penelitian Suparno (2012) yang menemukan hasil bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Jadi, dapat diartikan apabila semakin baik pengawasan anggaran yang dilakukan UPT. Disdikpora Kabupaten Badung maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

SIMPULAN

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada UPT. Disdikpora Kabupaten Badung maka akan berpengaruh pada semakin meningkatnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan UPT. Disdikpora Kabupaten Badung tersebut.

Efektivitas pelaksanaan pengawasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin efektif pelaksanaan pengawasan anggaran yang dilaksanakan oleh UPT. Disdikpora Kabupaten Badung, maka akan berpengaruh pada meningkatnya kualitas laporan keuangan tersebut

REFERENSI

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou, 211, 811-818.
- Bangsa, I. N. (2018). The Effect of Internal Control Systems, Accounting Systems on the Quality of Financial Statements Moderated by Organizational Commitments. *Accounting Analysis Journal*, 7(2), 127-134.
- Baxter. (2007). Audit Committees and financial reporting quality, PhD Dissertation Thesis, University of Queensland, Australia.
- Christianto, & Hwian. (2009). Pembaharuan Makna Asas Legalitas. *Jurnal Hukum Pembangunan Tahun*, 39(3).
- Dobija, D. (2015). Exploring audit committee practices: oversight of financial reporting and external auditors in Poland. *Journal of Management &*

- Governance.*, 19(1), 113-143.
- Downe, R., & Nicol., S. (2016). Review of budget oversight by parliament: Ireland. *Jurnal on Budgeting.*, 16(1), 65-115.
- Fitriani. (2017). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. *J. Urnal EMOR*, 2.(1), 112-125.
- Ghozali, I., & Chairi. (2016). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanto, A. (2012). Penggunaan Basis Akrua Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi. Dharma Ekonomi.*, (36).
- Jonas, G., & Blanchet, J. (2000). Assessing Quality of Financial Reporting. *Accounting Horizons*, 14(3).
- Kanakriyah, R. (2016). The Effect Of Using Accounting Information Systems On The Quality Of Accounting Information According To Users Perspective In Jordan. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research.*, 4(11), 58-75.
- Kanters, K. (2017). The relationship between social ties and quality of financial oversight. *Journal Accounting and Control University Nijmegen.*, 1-36.
- Khaile, S. T. (2011). Key Requirements For Effective Municipal Budget Oversight. *Journal University of The Western Cape*.
- Murungi, S., & Kayigamba., C. (2015). The Impact of Computerized Accounting System on Financial Reporting in the Ministry of Local Government of Rwanda. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS).*, 6(4), 261-265.
- Muskanan, M. (2014). The effectiveness of the internal controlling system implementation in fiscal decentralization application. *International Conference on Accounting Studies.*, 164, 180-193.
- Nurillah, A. S. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis.*, 1(1), 2337-3806.
- Pangalila, P., & Warongan. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.*, 16(4).
- Putra, G. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu., 4(1).
- Ratifah, I., & Ridwan., M. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan., 11(1), 29-39.
- Rini, P. N. F. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Roviyantie, D. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi.*, 4(1), 57-75.

- Santiso, C. (2014). Legislatures and Budget Oversight in Latin America: Strengthening Public Finance Accountability in Emerging Economies. *Journal on Budgeting.*, 4(2), 47-76.
- Schalk, S. (2014). Financial Oversight. A publication of the South African Legislative Sector., 1-94.
- Sugandi, J. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada SKPD se-Kabupaten Kuansing). *Jurnal Akuntansi. Universitas Riau.*
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV Alfabeta.
- Sugut, O. C. (2014). The Effect Of Computerised Accounting Systems On The Quality Of Financial Reports Of Non Governmental Organisations In Nairobi County, Kenya. *Journal Administration University of Nairobi.*, 1-61.
- Suparno. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan.
- Wati, K. D. N. T. H., & Sinarwati., N. K. (2014). Pengaruh SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi.*, 2(1).
- Wibawa, K. A., Sadu, N. K. S., & Yuniarta, G. A. (2017). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak*, 2(8).
- Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris Pada Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah SeSumat, 1(1).